

# **PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**



## **RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Proses pembangunan berawal dari tahap perencanaan yang menjadi landasan sekaligus pemandu arah pembangunan guna mencapai tujuannya. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yakni menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Disamping itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan melewati beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi.  
Tahap ini dilakukan dengan:
  - a. membentuk Tim Penyusun Renja Kecamatan Purwodadi;
  - b. melaksanakan orientasi mengenai Renja untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renja Kecamatan Purwodadi;
  - c. menyusun jadwal pelaksanaan sebagai panduan kerja; dan

2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi  
Pada tahap ini dilakukan analisis gambaran pelayanan Kecamatan Purwodadi dan mengevaluasi capaian Renja Kecamatan Purwodadi tahun yang lalu.
3. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi.  
Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan rancangan awal Renja Kecamatan Purwodadi, yang mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Grobogan. Penyempurnaan tersebut mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran.
4. Pelaksanaan Forum Lintas Sektoral.  
Tahap ini merupakan koordinasi antar Unit Kerja yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi.
5. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi.  
Tahap ini dilakukan dalam rangka mempertajam rumusan program, kegiatan dan pagu indikatif. Rancangan akhir Renja Kecamatan Purwodadi disusun dengan sistematika:
  - I. Pendahuluan
  - II. Hasil evaluasi Renja Tahun lalu
  - III. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
  - IV. Rencana kerja dan pendanaan
  - V. Penutup
6. Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi.  
Rancangan akhir Rencana Kerja disampaikan oleh Bappeda Kabupaten Grobogan kepada Bupati Grobogan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Grobogan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Purwodadi Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

- Maksud

Rancangan Awal Renja Kecamatan Purwodadi disusun sebagai dokumen awal yang selanjutnya akan disempurnakan lagi menjadi rancangan renja dan renja yang menjadi pedoman dan arah bagi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode satu tahun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten dan berpedoman pada Renstra Kecamatan Purwodadi.

- Tujuan

Rancangan Awal Renja Kecamatan Purwodadi disusun agar tujuan dan sasaran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan tahun 2024 dapat dicapai.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun  
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  
Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

## BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah  
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun  
berjalan)\* Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Purwodadi

Lembar : .....

Kode	qaZ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program danKeluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun ( 2002)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023 )	Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
Tujuan : meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasaranaserta layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan d i kecamatan												
Sasaran-1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepda masyarakat												
1			UNSUR KEWILAYAHAN									
1	01		KECAMATAN									
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP	Skor 73,5	Skor 66	Skor 66	Skor 66	100	Skor 78	Skor 78	100
1	01	01	02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhutan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	5	27.326.750	20,610,000	19,972,800	96.91	16.205.000	63.504.550	20.00%
1	01	01	03 Administrasi Kepegawaiaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu		83.746.193	112,394,900	110,303,157	98.14	93.084.000	287.133.350	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	46.528.000	52,970,000	51,306,500	96.86	52.664.000	150.498.500	100.00%

				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7	37.218.193	59,424,900	58,996,657	99.28	40.420.000	136.634.850	14.29%
1	01	01	04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		739.583.676	777,347,200	755,978,155	97.25	571.265.000	2.066.826.831	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	10.004.500	20,164,700	19,928,200	98.82	19.337.000	49.269.700	100.00%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	278.057.800	398,199,000	392,196,000	98.49	323.543.000	993.796.800	8.33%
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12	99.803.500	78,826,000	77,808,050	98.71	61.632.000	239.243.550	8.33%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	19.437.80	20,879,900	20,677,800	99.03	19.620.000	59.735.600	8.33%
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	12	265.093.750	176,902,600	176,068,905	99.53	97.423.000	538.585.655	8.33%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	67.186.326	82,375,000	79,300,000	96.27	49.710.000	196.196.326	8.33%
1	01	01	05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu		197.850.000	6,800,326,100	6,230,435,221	91.62	1.456.945.000	7.885.230.221	
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	1	0	6,785,400,000	6,215,582,221	91.60	1.443.500.000	7.659.082.221	100.00%
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1	197.850.000	14,926,100	14,853,000	99.51	13.445.000	226.148.000	100.00%
1	01	01	06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia		454.237.990	547,957,500	511,208,840	93.29	689.867.850	1.655.314.680	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	183.614.750	188,097,500	185,805,000	98.78	213.875.000	583.294.750	8.33%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12	80.014.490	108,250,000	78,968,840	72.95	105.324.850	264.308.180	8.33%

					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	190.608.750	251,610,000	246,435,000	97.94	370.668.000	807.711.750	8.33%
1	01	01	07		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		133.625.700	109,329,300	108,755,100	99.47	59.345.150	301.725.950	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	32.017.000	31,278,000	31,254,000	99.92	20.312.000	83.583.000	8.33%
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	70.548.200	78,051,300	77,581,100	99.40	39.033.150	187.162.450	100.00%
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau bangunan Lainnya	12	31.060.500					31.060.500	8.33%
1	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap		102.784.600	59,778,250	51,727,000	86.53	60.031.000	214.242.600	
1	01	02	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah		23.347.900	25,000,000	23,125,000	92.50	26.575.000	73.047.900	
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan)	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	1	23.347.900	25,000,000	23,125,000	92.50	26.575.000	73.047.900	100.00%
1	01	02	02		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan		79.436.700	34,778,250	28,602,900	82.24	33.456.000	141.495.600	
					Perencanaan Kegiatan Pelayanan	Jumlah dokumen pelayanan yang	1	79.436.700	34,778,250	28,602,900	82.24	33.456.000	141.495.600	100.00%

				kepada Masyarakat di Kecamatan	disusun (SOP, SPP, Maklumat Pelayanan, Inovasi, dsb)								
1	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat aktif		1.119.637.090	1,415,638,250	1,408,295,575	99.48	1.415.313.000	3.943.245.665	
1	01	03	01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan desa		1.119.637.090	1,408,588,000	1,401,245,375	99.48	1.408.588.000	3.929.470.465	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	10	956.621.550	1,202,147,187	1,197,111,475	99.58	1.227.000.000	3.380.733.025	10.00%
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (PKK, UMKM, Produk Unggulan, Wisata Unggulan dsb)	10	163.015.540	206,440,813	204,133,900	98.88	181.588.000	548.737.440	10.00%
1	01	03	02	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pelaksanaan yang dilimpahkan ke kecamatan			7,050,200	7,050,200	100.00	6.725.000	13.775.200	
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pewrsentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyrakatan	1		7,050,250	7,050,200	100.00	6.725.000	13.775.200	100.00%
1	01	04		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif		273.048.400	6,575,000	6,575,000	100.00	6.577.000	286.200.400	
1	01	04	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif		273.048.400	6,575,000	6,575,000	100.00	6.577.000	286.200.400	
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	273.048.400	6,575,000	6,575,000	100.00	6.577.000	286.200.400	100.00%
1	01	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan			268,152,750	249,276,750	92.96	268.369.000	517.645.750	
1	01	05	01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah rusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			268,152,750	249,276,750	92.96	268.369.000	517.645.750	

				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1	0	268,152,750	249,276,750	92.96	268.369.000	517.645.750	100.00%	
1	01	06		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi			363.992.700	415,748,750	378,218,950	90.97	407.456.000	1.149.667.650	
1	01	06	01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	1		415,748,750	378,218,950	90.97	407.456.000	785.674.950	100.00%	
1	01	06	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	9.380.100	9,380,100	9,380,100	100.00	9.005.000	27.765.200	100.00%	
1	01	06	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	4.999.850	5,000,200	5,000,200	100.00	4.996.000	14.996.050	100.00%	
1	01	06	04	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Difasilitasi Tupoksinya	1	324.000.000	375,755,000	338,225,500	90.01	369.395.000	1.031.620.500	100.00%	
1	01	02	05	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	7.499.550	5,953,900	5,953,850	100.00	6.295.000	19.748.400	100.00%	
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1	6.459.600	7,499,700	7,499,550	100.00	6.100.000	20.059.150	100.00%	
				Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	jumlah Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1	5.699.950	6,459,850	6.459.800	100.00	5.715.000	11.414.950	100.00%	
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1	5.953.650	5,700,000	5.699.950	100.00	5.950.000	11.903.650	100.00%	



31 Maret 2023

CAMPAK PURWODADI

TONDI SUMARJAKA, SH

NIB 19700722 199403 1 007

## **Realisasi Anggaran**

Evaluasi dan analisis kinerja merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah pengukuran kinerja, sehingga dapat diketahui lebih lanjut mengenai hal-hal yang terkait dan berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dalam sebuah organisasi. Disamping itu dapat dijadikan alat untuk melihat perkembangan dan kesesuaian antara jenis program ataupun kegiatan dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rancangan Strategis organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas berikut ini kami sajikan analisis dan evaluasi kinerja Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13.517.564.000,- dan Terealisasi sebesar Rp. 12.768.924.817,- atau 94,46% dengan capaian kinerja dan realisasi kegiatan :

1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Capaian kinerja 96,91% mengingat Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD realisasi anggaran sebesar 96,91% ( dari anggaran Rp. 20.610.000,- realisasi Rp. 19.972.800,-)

2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah

- a. Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya Capaian kinerja 96,86% mengingat Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya realisasi anggaran sebesar 96,86 % (dari anggaran Rp. 52.970.000,- realisasi 51.304.500,-)
- b. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Berdasarkan Tugas dan Fungsi Capaian kinerja 99,28% mengingat Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Berdasarkan Tugas dan Fungsi realisasi anggaran sebesar 99,28 % ( dari anggaran Rp. 50.424.900,- terealisasi Rp.58.996.657,-)

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan komponen Instalasi /Penerangan Bangunan kantor capaian kinerja 98,82 % mengingat Penyediaan komponen Instalasi /Penerangan Bangunan kantor capaian kinerja 98,82% ( dari anggaran Rp. 20.164.700,- terealisasi Rp. 19.928.000,- )
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor capaian kinerja 98,49 % mengingat Penyediaan Bahan Logistik Kantor realisasi 98,49 % ( dari anggaran Rp.398.199.000,- terealisasi Rp. 392.196.000,-)
- c. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan capaian kinerja 98,71% mengingat Penyediaan Cetak dan Penggandaan realisasi 98,71% ( dari Anggaran Rp. 78.826.000,- teralisasi Rp. 77.808.050,- )
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan capaian kinerja 99,03% mengingat Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan realisasi anggaran 99,03 % ( dari Anggaran Rp. 20.879.900,- terealisasi Rp. 20.677.800,-)
- e. Penyediaan Bahan material capaian kinerja 99,93% mengingat Penyediaan Bahan /material ( dari anggaran Rp. 176.902.600,- terealisasi Rp. 176.068.905,- )
- f. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD capaian kinerja 96,27% mengingat Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD realisasi 96,27% ( dari anggaran Rp. 82.375.000,-, terealisasi Rp. 79.300.000,-)

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya capaian Kinerja 91,60% mengingat pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya realisasi 91,60% ( dari anggaran Rp. 6.765.400.000,- terealisasi Rp. 6.230.435.221,-)
- b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor capaian kinerja 99,51% mengingat Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor realisasi 99,51% ) dari Anggaran Rp. 14.926.100,- terealisasi Rp. 14.853.000,-)



- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat capaian Kinerja 98,%  
( dari anggaran Rp. 188.097.500,- terealisasi Rp. 185.805.000,- )
    - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Capaian Kinerja 84,89 % ( dari anggaran Rp. 93.250.000,- terealisasi Rp. 78.968.840,- )
    - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor capaian Kinerja 97,94% ( dari anggaran Rp. 251.610.000,- terealisasi Rp. 246.435.000,-)
  - 6) Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan capaian kinerja 99,92 % ( dari anggaran Rp.31.254.000,- terealisasi Rp.31.254.000,-)
    - b. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Gedung kantor capai kinerja 99,40% ( dari anggaran Rp. 78.051.300,- teralisasi Rp. 77.581.100,-)
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik capaian kinerja 86,53 % ( dari anggaran Rp. 59.778.250,- terealisasi Rp.51.727.000,-)
- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkaiait capaian kinerja 92,50% ( dari anggaran Rp. 25.000.000,- terealisasi Rp. 23.125.000,- )
  - 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat capaian kinerja 82,24% ( dari anggaran Rp. 34.778.250,- terealisasi Rp. 28.602.900,-)

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan capaian kinerja 82,24% ( dari anggaran Rp. 34.778.250,- terealisasi Rp. 28.602.900,-)
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan capaian kinerja 99,48 % (dari anggaran Rp. 1.415.638.250,- terealisasi Rp. 1.408.295.575,-)
  - 1) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan capaian kinerja 99,48 % (dari anggaran Rp. 1.408.588.000,- terealisasi Rp. 1.401.245.375,-)
    - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan capaian kinerja 99,58 % (dari anggaran Rp. 1.202.147.187,- terealisasi Rp. 1.197.111.475,-)
    - b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan capaian kinerja 98,88 % (dari anggaran Rp. 206.440.813,- terealisasi Rp. 204.133.900,-)
  - 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan capaian Kinerja 100% ( dari anggaran Rp. 7.050.250,- terealisasi Rp. 7.050,200,;)
    - a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan capaian kinerja 100% ( dari anggaran Rp. 7.050.250,- terealisasi Rp. 7.050.200,- )
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum capaian kinerja 100 % (dari anggaran Rp. 6.575.000,- terealisasi Rp. 6.575.000,-)
  - 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum capaian kinerja 100% (dari anggaran Rp. 6.575.000,- terealisasi Rp. 6.575.000,-)
    - a. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat capaian kinerja 100% (dari anggaran Rp. 6.575.000,- terealisasi Rp. 6.575.000,-)
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum capaian kinerja 92,96 % ( dari anggaran 268.152.750,- terealisasi Rp. 249.276.750,- )
  - 1) Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasa Kepala Daerah capaian kinerja 92,96% ( dari anggaran 268.152.750,- terealisasi Rp. 249.276.750,-)

- a. Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia kegiatan capaian kinerja 92,96% ( dari anggaran Rp. 268.152.750,- terealisasi Rp. 249.276.750 )
- 
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa capaian kinerja 90,97% ( dari anggaran Rp.415.748.750,- terealisasi Rp. 378.218.950,-)
    - 1) Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa capaian kinerja 90,97% ( dari anggaran Rp.415.748.750,- terealisasi Rp. 378.218.950,-)
      - a. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa capaian kinerja 100% ( dari anggaran Rp. 9.380.100,- terealisasi Rp. 9.380.100,-)
      - b. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Dana capaian kinerja 100% ( dari anggaran Rp. 5.000.200,- terealisasi Rp. 5.000.200,-)
      - c. Fasilitas pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan capaian kinerja 90,01% ( dari anggaran Rp. 375.755.000,- terealisasi Rp.338.225.500,-)
      - c. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif capaian kinerja 100 % ( dari anggaran Rp. 5.953.900,- terealisasi Rp.5.953.850,-)
      - d. Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa capaian kinerja 100 % ( dari anggaran Rp. 7.499.700,- terealisasi Rp. 7.499.550,-)
      - e. Koordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya capaian kinerja 100 % ( dari anggaran Rp. 6.459.800,- terealisasi Rp. 6.459.800,-)

- f. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan capaian kinerja 100 % ( dari anggaran Rp. 5.700.000,- terealisasi Rp. 5.699.950,-)

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Perangkat Daerah  
Kecamatan Purwodadi  
Kabupaten Grobogan

NO	Indikator	SPM/ stan dar nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2025 (thn n+)	Tahun 2026 (thn n+)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahu n 202 3 (tnn n)	Tahun 2-024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
1	Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan Purwodadi	B	B ( 90 )	B	B ( 82,70 )	B ( 82,99 )	B ( 83,29 )	B ( 83,58 )	B ( 83,88 )	B (86,79 )	BB (89,75)	BB (89,89)	Bb ( 89,99)	Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan Purwodadi
2	Nilai Sakip Kecamatan Purwodadi	B	B ( 65)	B	B ( 65)	B ( 68)	BB ( 70)	BB ( 72)	BB ( 73,5)	B	B	B ( 82,70)	B ( 83,75)	Nilai Sakip Kecamatan Purwodadi

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

- 2.2.01 Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
- 2.2.02 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 2.2.03 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development Goals*);
- 2.2.04 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 2.2.05 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.3.04 Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31:

Lembar .dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Purwodadi	Persentase Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	12 bulan	10.556.190,250	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Purwodadi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	30,595,000	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Purwodadi	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	12	5,337,464,000	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Purwodadi	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	12	218,629,000	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Purwodadi	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	821,523,300	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Purwodadi	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	2 paket	2,672,411,200	

						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purwodadi	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	12	819,289,750	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purwodadi	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	656,278,000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Purwodadi	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	12	45,129,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Purwodadi	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	4	45,129,000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Purwodadi	Persentase lembaga masyarakat aktif	10	1,331,652,000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Purwodadi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	1,301,318,600	
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Purwodadi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	10,326,400	
						Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Purwodadi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1	20,007,000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Purwodadi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	13,684,000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Purwodadi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	13,684,000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Purwodadi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka	2	431,601,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	Kecamatan Purwodadi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	1	418,117,000	

			Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
						Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Purwodadi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1	13,484,000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Purwodadi	Persentase desa dengan tertib administrasi	1	546,895,400	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Purwodadi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	14,940,400	
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Purwodadi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	15,000,000	
						Pelaksanaan Lomba Desa	Kecamatan Purwodadi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Lomba Desa	1	15,000,000	
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Purwodadi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	15,000,000	
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Purwodadi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	15,000,000	
						Fasilitasi Pelaksanaan	Kecamatan Purwodadi	Jumlah Dokumen	1	15,000,000	



						Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Purwodadi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1	15,000,000	
						Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Purwodadi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1	15,000,000	
						Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Purwodadi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	15,000,000	
						Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Purwodadi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1	15,000,000	
						Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Purwodadi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1	15,000,000	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

2.4.01 Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2.4.02 Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

2.4.03 Sajikan Tabel T-C.32 sebagai berikut:

Tabel T-C.32.  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2024  
Kabupaten Grobogan  
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Purwodadi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Purwodadi	Persentyase Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	10.556.190,250	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Purwodadi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,595,000	Kasi PMD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Purwodadi	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	5,337,464,000	Kasubag Keuangan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Purwodadi	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	218,629,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Purwodadi	Persentase pemenuhan Administrasi Umum	821,523,300	Kasubag Umum dan Kepegawaian

			Perangkat Daerah		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Purwodadi	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	2,672,411,200	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purwodadi	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	819,289,750	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purwodadi	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	656,278,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kecamatan Purwodadi</b>	<b>Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap</b>	<b>45,129,000</b>	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Purwodadi	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan		Kasi PU dan Kasi Kesra
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kecamatan Purwodadi</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat aktif</b>	<b>,331,652,000</b>	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Purwodadi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,301,318,600	Kasi Kesra dan PMD Kelurahan
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Purwodadi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10,326,400	Kasi PMD
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Purwodadi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	20,007,000	Kasi PMD
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kecamatan Purwodadi</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</b>	<b>13,684,000</b>	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Purwodadi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	13,684,000	Kasi Trantibun
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Kecamatan Purwodadi</b>	<b>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia</b>	<b>431,601,000</b>	

			<b>Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</b>		
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Purwodadi	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	418,117,000	Kasi Trantibun
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Purwodadi	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>	13,484,000	Kasi Trantibun
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kecamatan Purwodadi</b>	<b><i>Persentase desa dengan tertib administrasi</i></b>	<b>546,895,400</b>	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Purwodadi	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	14,940,400	Kasi Tapem
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Purwodadi	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	15,000,000	Kasi Tapem
	Pelaksanaan Lomba Desa	Kecamatan Purwodadi	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Lomba Desa</i>	15,000,000	Kasi Tapem
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Purwodadi	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	15,000,000	Kasi Tapem
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Purwodadi	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	15,000,000	Kasi Tapem
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Purwodadi	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>	15,000,000	Kasi Tapem
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Purwodadi	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</i>	15,000,000	Kasi Tapem
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Purwodadi	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan</i>	15,000,000	Kasi PMD

			<i>Pembangunan Partisipatif</i>		
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Purwodadi	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	15,000,000	Kasi PMD
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Purwodadi	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	15,000,000	Kasi PMD
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Purwodadi	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</i>	15,000,000	Kasi PMD

Tabel T-C.30.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan

NO	Indikator	SPM/ stan dar nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2025 (thn n+)	Tahun 2026 (thn n+)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
1	Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan Purwodadi	B	B ( 90 )	B	B ( 82,70 )	B ( 82,99 )	B ( 83,29 )	B ( 83,58 )	B ( 83,88 )	B (86,79 )	BB (89,75)	BB (89,89)	Bb ( 89,99)	Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan Purwodadi
2	Nilai Sakip Kecamatan Purwodadi	B	B ( 65)	B	B ( 65)	B ( 68)	BB ( 70)	BB ( 72)	BB ( 73,5)	B	B	B ( 82,70)	B ( 83,75)	Nilai Sakip Kecamatan Purwodadi

Realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Realisasi perolehan skor SAKIP Pemda tahun 2021 dengan kategori B diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas tingkat akuntabilitas /pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Nilai evaluasi dikelompokkan dalam skor/skala prestasi capaian kinerja sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	> 90 - 100	<b>Sangat Memuskan</b>
2	A	> 80 - 90	<b>Memuaskan,</b> memimpin perubahan, pekerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	> 70 - 80	<b>Sangat baik,</b> akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal
4	B	> 60 - 70	<b>Baik,</b> akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan atau perlu sedikit perbaikan.
5	CC	> 50 - 60	<b>Cukup (memadai),</b> akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	> 30 - 50	<b>Kurang,</b> sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistim untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	> 0 - 30	<b>Sangat Kurang,</b> sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerpapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sebagai perbandingan kami tampilkan hasil evaluasi SAKIP Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2019 dan 2020 dengan predikat B yang menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah menunjukkan hasil yang baik namun masih tetap memerlukan perbaikan.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

	<b>Komponen yang dinilai</b>	<b>Bobot</b>	<b>Nilai tahun 2019</b>	<b>Nilai tahun 2020</b>
A	Perencanaan Kinerja	30	20,62	21,00
B	Pengukuran Kinerja	25	16,57	16,62
C	Pelaporan Kinerja	15	9,36	9,52
D	Evaluasi Internal	10	6,06	6,16
E	Capaian Kinerja	20	8,26	9,11
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	100	<b>60,87</b>	<b>62,41</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	<b>B</b>

Sedangkan untuk Kecamatan Purwodadi bersama 18 kecamatan lainnya untuk saat ini belum dinilai oleh Kabupaten sehingga belum bisa mengisi capaian nilai/skor penilaian SAKIP dari Kabupaten. Namun upaya memperbaiki kinerja pelayanan di jajaran kecamatan Kradenan telah dilakukan dalam rangka bentuk tanggung jawab ikut menyukseskan agenda reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan diantaranya adalah :

- 1) Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) ;



- 2) Secara rutin dilakukan evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam rentang waktu triwulanan dan tahunan;
- 3) Adanya penilaian setiap tahun dari Kementerian Dalam Negeri terhadap SAKIP Pemda telah memacu seluruh stakeholder SAKIP untuk terus berbenah dalam rangka menuju *result oriented government*.

Faktor penghambat dalam pencapaian nilai SAKIP ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyampaian data dukung dari masing-masing seksi dan subbag sedikit terlambat; dan
- 2) Belum adanya aplikasi yang integrated antara keuangan dan kinerja agar memudahkan proses dari sejak perencanaan hingga pelaporannya.

- b. Nilai / skor survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public yang telah dilakukan oleh Pemda merupakan skor survey yang diperoleh oleh OPD yang menjadi obyek pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

Indikator ini pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 82,7 sementara realisasinya sebesar 88,75 melampaui target yang telah ditetapkan.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pencapaian target nilai kepuasan masyarakat secara terukur dan konsisten;
- 2) Melakukan sosialisasi optimalisasi pelayanan publik; dan
- 3) Komitmen kepala dan personil unit kerja yang kuat.

Faktor penghambat dalam pencapaian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Belum adanya mekanisme reward and punishment yang baku untuk memacu percepatan peningkatan kualitas pelayanan public di jajaran pemerintah kabupaten Grobogan; dan
- 2) Pelaksanaan survey masih bersifat sampel dan belum seluruh masyarakat yang dilayani ikut berpartisipasi.

## **2.2 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Purwodadi**

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Purwodadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

### **a. Permasalahan Sekretariat**

- 1) Kurangnya jumlah Personil dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
- 2) Kurang memadainya sarana prasarana yang mendukung kegiatan di Kecamatan
- 3) Kurangnya kompetensi yang dimiliki personil dalam menjalankan tugas dan fungsi
- 4) masih kurangnya pengelolaan data dan pengarsipan dokumen

### **b. Permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- 1) menurunnya kesadaran gotong-royong masyarakat
- 2) keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa

### **c. Permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- 1) Kurangnya Kepatuhan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah
- 2) Kurangnya kelengkapan sarana pendukung dalam operasional penegakan Peraturan Daerah
- 3) Kurangnya peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan anggota Satlinmas yang ada di Masyarakat

### **d. Permasalahan Kesejahteraan Rakyat**

- 1) kurangnya Koordinasi dalam penyediaan data Kesejahteraan Sosial

**e. Permasalahan Seksi Pelayanan Umum**

- 1) Belum optimalnya penerapan SOP maupun SPP dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
- 2) Kurangnya sarana pendukung yang responsif terhadap perempuan, lansia, dan difabel

**f. Permasalahan Seksi Tata Pemerintahan**

- 1) Kurangnya sosialisasi kepada Perangkat Desa terkait penyusunan APBDes dan Laporan Petanggungjawaban APBDes  
Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah desa dalam intensifikasi PBB.

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah maka isu-isu strategis Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dapat dibagi menjadi beberapa isu utama, yaitu:

1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.
  - a. Belum lengkapnya sarana dan prasarana pendukung.
  - b. Kurangnya personel menjadikan banyaknya fungsi yang dirangkap sehingga output kinerja juga kurang maksimal.
  - c. Perlunya integrasi system dan data.
  - d. Koordinasi antar fungsi masih perlu ditingkatkan lagi.
2. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan
  - a. Belum Optimalnya verifikasi dan SPI (Sistem Pengendalian Internal).
  - b. Belum semua unit memahami sistem pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan.
3. Isu terkait pelayanan publik.
  - a. Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan secara menyeluruh(komprehensif) di semua unit pelayanan.
  - b. Masih perlunya sosialisasi kepada masyarakat maupun ASN terkait hak dan kewajiban masing-masing dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

### **2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan adalah Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024  
Kecamatan Purwodadi Kab.Grobogan

No		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2024		Hasil Analisis Kebutuhan 2024	
					Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
						Rp		Rp
1		2	3	4	5	6	7	8
1.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	70	10,556,190,250	70	10,556,190,250
			Laporan Keuangan Sesuai SAP	%	100		100	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	%	100		100	
			Presentase Pemenuhan Area Penilaian Manejemen Resiko	%	60		60	
	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	%	100	30,595,000	100	30,595,000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun		1		1	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun		1		1	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun		1		1	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun		1		1	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun		1		1	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun		1		1	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1	30,595,000		30,595,000
	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	100	5,337,464,000	100	5,337,464,000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	bulan	14	5,302,502,000	14	5,302,502,000
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	bulan	12	-	12	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	12	10,414,000 -	12	10,414,000 -
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun		12	-	12	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	dokumen	12	24,548,000 -	12	24,548,000 -
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	12	-	12	-

	1.3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik</b>	%	100	-	100	-
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	10	-	10	-
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dimanfaatkan	unit	111	-	111	-
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah peserta Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	orang	14	-	14	-
	1.4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu</b>	%	100	218,629,000	100	218,629,000
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan	stel	30	-	30	-
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel	119	63,545,000	30	63,545,000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	30	90,084,000		90,084,000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	30	-	30	-
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	30	65,000,000	30	65,000,000
	1.5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	%	100	821,523,300	100	821,523,300
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	unit	12	114	12	30,452,500
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit	10		10	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	unit	10	-	10	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	unit	12	395,008,000	12	395,008,000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	unit	12	104,231,800	12	104,231,800
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	unit	12	24,000,000	12	24,000,000
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	unit	12	143,010,000	12	143,010,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	40	114.340.000	40	114.340.000
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diadakan	unit	40		40	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		40	10,481,000	40	10,481,000

	1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	100	2,672,411,200	100	2,672,411,200
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	unit				
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	unit				
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	unit		-		-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	unit				
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	unit		-		-
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	unit		-		-
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	unit		2,482,007,200		2,482,007,200
					5	-	5	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit		190,404,000		190,404,000
					1	-	1	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit				
						-		-
	1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	819,289,750	100	819,289,750
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	bulan		15,000,000		15,000,000
					12		12	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan		149,183,000		149,183,000
					12		12	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan		655,106,750		655,106,750
					12		12	
	1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	100	656,278,000	100	656,278,000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	unit		41,278,000		41,278,000
					6		6	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	unit		-		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	unit				
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya terpelihara	unit		-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ter rehabilitasi/terpelihara	unit		575,000,000		575,000,000
					1		1	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ter rehabilitasi/terpelihara	unit				
					1	-	1	-

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit	1	40,000,000 -	1	40,000,000 -
2		<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap</b>	%	100	45,129,000	100	45,129,000
	2.1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi</b>	%				
		7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait ( <b>Musrenbang Kecamatan</b> )	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	Kali				
	2.2	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah</b>	%		-		-
		7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen pelayanan yang disusun ( <b>SOP, SPP, Maklumat Pelayanan, Inovasi, dsb</b> )	Dok				
		7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah indikator SPM yang didata	Indikator				
		7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya dokumen SKM	Dok				
	2.3	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan</b>	%	100	45,129,000	100	45,129,000
		7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan non usaha yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan	Jenis				
		7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan non perizinan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Jenis				
		7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan		1	45,129,000	1	45,129,000
3		<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat aktif</b>	Persen	100	1,331,652,000 -	100	1,331,652,000 -
	3.1	<b>Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan desa</b>	Keg	100	= -	100	-
		7.01.03.2.01.01 pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Desa	16	1,301,318,600 -	16	1,301,318,600 -
		7.01.03.2.01.03 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1	20,007,000	1	20,007,000



		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	Keg	100	-	100	
		7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan pemantauan Musrenbangdes	Desa				
		7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PKK, UMKM, Produk Unggulan, Wisata Unggulan dsb)					
	3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan	lembaga	1	10,326,400	1	10,326,400
		7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan yang mengikuti peningkatan kapasitas	orang	1	10,326,400	1	10,326,400
4		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	persen	100	13,684,000	100	13,684,000
	4.1	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	13,684,000	100	13,684,000
		7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi Forkompimcam	Kegiatan	1	-	1	-
		7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan koordinasi FKUB	Kegiatan	1	13,684,000	1	13,684,000
	4.2	7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	kegiatan				-
		7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan patroli penertiban trantibum	kegiatan				-
5		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	bulan	1	431,601,000	1	431,601,000
	5.1	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	bulan	1	431,601,000	1	431,601,000

		7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	kegiatan	1	431,601,000	1	431,601,000
		7.01.05.2.01.02 Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti bintek, sosialisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang		13.484.000		-
6		<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa dengan tertib administrasi</b>		<b>100</b>	<b>546,895,400</b>	<b>100</b>	<b>29.150.000</b>
	6.1	<b>7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase desa dengan tertib administrasi</b>	%	<b>100</b>	<b>546,895,400</b>	<b>100</b>	<b>546,895,400</b>
		7.01.06.2.01.01 Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kegiatan	1	14,940,400	1	14,940,400
		7.01.06.2.01.02 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa	13	15,000,000	14	15,000,000
		.01.06.2.01.02 Pelaksanaan Lomba desa				15,000,000		15,000,000
		7.01.06.2.01.03 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	13	15,000,000	14	15,000,000
		7.01.06.2.01.05 Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	13	15,000,000	14	15,000,000
		7.01.06.2.01.06 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa		-	14	-
		7.01.06.2.01.07 Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah BPD yang dibina	BPD	13	15,000,000	14	15,000,000
		7.01.06.2.01.12 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Difasilitasi Tupoksinya	Lembaga	4	- 396,955,000	14	- 396,955,000
		7.01.06.2.01.14 Fasilitas Kerja Sama Antar desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama (antar Desa dan Pihak Ketiga)	Desa	14	-	14	-
		Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif					
		7.01.06.2.01.16 Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	1	- 15,000,000	14	- 15,000,000
		7.01.06.2.01.16 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipati	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kegiatan		15,000,000		15,000,000
		7.01.06.2.01.16 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kegiatan		15,000,000		15,000,000
		7.01.06.2.01.16 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kegiatan		15,000,000		15,000,000
						<b>12,925,151,650</b>		<b>12,925,151,650</b>

#### **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada tahun 2023 terdapat usulan khusus masyarakat yang masuk terkait dengan Pengadaan Gedung Kantor Kecamatan di lahan milik Kecamatan Purwodadi yang berlokasi Jl. Kapten Rusdiyat II Danyang Kelurahan Danyang, lebih representative sekaligus memungkinkan terdapat tanah persawahan yang terbuka untuk masyarakat.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan yang menjadi Acuan/Pedoman**

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah pada tahun 2024 yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2024 yaitu: **“Penguatan daya saing SDM, didukung peningkatan reformasi birokrasi”**. Pembangunan tetap berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Penguatan tata kelola pemerintahan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi mulai dijadikan prioritas, selain tetap meneruskan pembangunan infrastruktur. Penguatan reformasi birokrasi menegdepankan pada pencapaian sasaransasaran yang ada, yakni akuntabilitas, kapabilitas dan pelayanan prima. Hal tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas perencanaan, penanggran dan pengawasan, peningkatan kompetensi ASN, serta meningkatkan mutu pelayanan publik didukung dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini meliputi:

- 1) Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- 2) Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat
- 3) Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (primary health care)
- 4) Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang

- 5) Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana
- 6) Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada
- 7) Penguatan daya dukung pelayanan publik yang prima
- 8) Pengembangan smart government dalam menunjang pengembangan smart city.
- 9) Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan
- 10) Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN

Sedangkan bila dilihat dari sasaran pembangunan Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagaimana teruraikan dalam table 3.2 di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Sasaran Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2024**

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	12,34 tahun
		Rata-rata lama Sekolah	7,04 tahun
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,14 tahun
3	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	Tingkat Capaian APE	Madya (0,6375 – 0,7724)
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik	87,22%
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	92,34%
		Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	76,07 %
		Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	B (0,20- 0,44)
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	Indeks Kualitas Air	Indeks 80,10
		Indeks Kualitas Udara	Indeks 87,15

		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks 62,75
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks 46,00
6	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks 0,68
7	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,23 %/tahun
		Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	0,5 %/tahun
		Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	1,59 %/tahun
		Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	1,47 persen
8	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	Nilai investasi di daerah	870,467 Milyar Rupiah
9	menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	Indeks Desa Membangun	Indeks 0,70
10	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PPKS	1,4 %/tahun
11	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,2 %
12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	Rata-rata nilai IKM	Kategori B (77,70)
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks Sangat Inovatif
13	Meningkatnya penerapan egovernment yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks 3,3
	Meningkatnya	Nilai SAKIP	Nilai B (70)

	akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan		
		Level Maturitas SPIP	Level 3 (3,1)
		Opini BPK	Opini WTP
		Indeks sistem merit	Kategori III (250)
13	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	73,85 %
14	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	Persentase Toleransi antar umat beragama	100%
		Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	100%

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Purwodadi

#### 3.2.1. Tujuan

Berpedoman pada tujuan dalam Renstra Kecamatan Purwodadi dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Kecamatan Purwodadi Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Bupati nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian, Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan maka tujuan Renja Kecamatan Purwodadi tahun 2024 adalah :

**“ Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan ”**

#### 3.2.2. Sasaran

Berpedoman pada sasaran dalam Renstra Kecamatan Purwodadi dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka sasaran Renja Kecamatan Purwodadi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Sasaran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan**  
**Tahun 2024**

No	Sasara n	Indikat or	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaran pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	Nilai B (77,70)
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP (Penilaian tim Kabupaten)	BB (70)

**3.3. Program dan Kegiatan**

**3.3.1. Penjabaran Program dan Kegiatan**

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2024 dengan berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kecamatan Purwodadi akan melaksanakan 6 program, 17 kegiatan, dan 72 sub kegiatan.



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju 2024**

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**KABUPATEN/KOTA**

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
  - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 6) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - 6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
  - 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Penyediaan Bahan/Material
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 9) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pengadaan Mebel
- 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- 6) Pengadaan Aset Tak Berwujud
- 7) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 9) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 7) Pemeliharaan Mebel
- 8) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 9) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- 10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 11) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 12) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

### a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan)

### g. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- 1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
- 2) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- 3) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

### h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

## c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

### a) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana
- 2) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

### b) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  - c) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
    - 1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
  - d) Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Tingkat kecamatan dan Kelurahan
    - 1) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
    - 2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
  - b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
    - 1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
    - 2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
7. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
- a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
    - 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

- 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 5) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- 6) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa
- 7) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
- 8) Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
- 9) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 10) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- 11) Koordinasi pendampingan Desa diwilayahnya
- 12) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Secara rinci rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Purwodadi tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan**  
**Kegiatan Perangkat Daerah Tahun**  
**2023 dan Prakiraan Maju 2024**  
**Kecamatan Purwodadi**

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp
KECAMATAN PURWODADI							10.072.624.756		9.251.655.200
Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat		Nilai IKM			82,99		83,29	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai	68	7.914.878.756	70	9.133.687.200
			Laporan Keuangan Sesuai SAP		%	100		100	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah		%	100		100	
			Presentase Pemenuhan Area Penilaian Manejemen Resiko		%	40		60	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dikali 100	%	100	-	100	-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun			1	-	1	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun			1		1	

		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun			1		1	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun			1		1	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun			1		1	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun			1		1	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					17	30,595,000
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>5.044.371.756</b>	<b>100</b>	<b>5,337,464,000</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN		bulan	14	<b>5.026.166.756</b>		5,302,502,000
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu		bulan	12	-	12	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		dokumen	12	-	12	10,414,000 -
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun			12	-	12	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun		dokumen	12	16.205.000 -	12	24,548,000 -

		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		dokumen	12	-	12	-
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik</b>	<b>Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi dalam aplikasi (SIM Aset) dibagi jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dikali 100</b>	%	100	-	100	-
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun		dokumen	10	-	10	-
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dimanfaatkan		unit	111	-	111	-
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah peserta Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		orang	14	-	14	-
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian dikali 100</b>	%	100	93.084.000	100	218,629,000
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan		stel				-
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		stel	119	52.664.000	119	63,545,000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		orang	30	-	30	-
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		orang	30		30	65,000,000
		Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi			orang	8	40.420.000	30	90,084,000
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100</b>	%	100	571.265.000	100	821,523,300
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		unit	35	19.337.000	35	30,452,500



		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		unit	10	-	10	-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		unit	10	-	10	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		unit	20	323.543.000	20	395,008,000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		unit	10	61.632.000	10	104,231,800
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		unit	12	19.620.000	12	24,000,000
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan		unit	20	97.423.000	20	143,010,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		kali	40	49.710.000	40	114,340,000
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diadakan		unit				
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					17	10,481,000
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.443.843.000</b>	<b>100</b>	<b>2,672,411,200</b>
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan		unit				
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan		unit				
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		unit	10		10	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan		unit	10		10	
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan		unit	10		10	-
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan		unit		-		-

		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun		unit	1	1.443.500.000	1	2,482,007,200
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		unit	1	13.445.000	1	190,404,000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		unit	1	-	1	-
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>689.867.850</b>	<b>100</b>	<b>819,289,750</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia		bulan	12	213.875.000	12	15,000,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		bulan	12	105.324.850	12	149,183,000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		bulan	12		12	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor		bulan	12	370.668.000	12	655,106,750
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>59.345.150</b>	<b>100</b>	<b>656,278,000</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara		unit	6	20.312.000	6	41,278,000
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara		unit				-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara		unit	12		12	
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya terpelihara		unit	12	-	12	-

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		unit	1		1	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		unit	1	39.033.150	1	575,000,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		unit	1	-	1	40,000,000
		<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap</b>	<b>Jumlah dan jenis layanan di kecamatan yang sudah menggunakan SOP tetap dibagi jumlah jenis layanan yang ada di kecamatan dikali 100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>60.031.000</b>	<b>100</b>	<b>45,129,000</b>
		<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi</b>	<b>Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang mendapatkan rekomendasi dibagi banyaknya kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dikali 100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>26.575.000</b>	<b>100</b>	
		7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan)	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan		Kali	1	26.575.000		
		<b>7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan dan dapat dilaksanakan dibagi jumlah urusan yang dilimpahkan ke kecamatan dikali 100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
		7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen pelayanan yang disusun (SOP, SPP, Maklumat Pelayanan, Inovasi, dsb)		Dok	12			
		7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah indikator SPM yang didata		Indikator	12			
		7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya dokumen SKM		Dok	12			

		7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan dibagi jumlah yang dilimpahkan dikali 100	%	100	33.456.000	100	45,129,000 -
		7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan non usaha yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan		Jenis	1		1	-
		7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan non perizinan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan		Jenis	1	-	1	-
		7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan			1	33.456.000 -	1	45,129,000 -
	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat (Kecamatan dan Kelurahan/Desa) dikali 100	Persen	100	1.415.313.000	100	1,331,652,000
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat dikali 100	Keg	100			
		7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan pemantauan Musrenbangdes		Desa				
		7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PKK, UMKM, Produk Unggulan, Wisata Unggulan dsb)						
		7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.415.313.000		
		7.01.03.2.02.02 Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	Tersedianya Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan			1.227.000.000		996,992,600

		7.01.03.2.02.02 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	Tersedianya Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan			181.588.000		150,129,000
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan dibagi jumlah lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan dikali 100	lembaga	14	- 6.725.000	14	10,326,400 -
		7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan yang mengikuti peningkatan kapasitas		orang	14	- 6.725.000	14	10,326,400 -
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	Jumlah Linmas (di Kecamatan dan Desa/Kelurahan) aktif dibagi jumlah Linmas (di Kecamatan dan Desa/Kelurahan) Aktif	persen	100	6.577.000	100	13,684,000
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dikali 100	persen	100	6.577.000	100	13,684,000
		7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi Forkompimcam		Kegiatan	1		1	-
		7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan koordinasi FKUB		Kegiatan	1	6.577.000	1	13,684,000
		7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada dikali 100	kegiatan	1	-	1	-

		7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan patroli penertiban trantibum		kegiatan	1	-	1	-
		<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100	bulan	12	268.369.000	12	418,117,000
		<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengusahan Kepala Daerah</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100	bulan	12	268.369.000	12	418,117,000
		7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		kegiatan	1	268.369.000	1	418,117,000
		7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti bimtek, sosialisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		orang				-
		<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa dengan tertib administrasi	Jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100		100	407.456.000	100	546,895,400
		<b>7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase desa dengan tertib administrasi	Jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100	%	100	407.456.000	100	546,895,400

		7.01.06.2.01.01 Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Kegiatan				14,940,400
		7.01.06.2.01.02 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Desa	13	9.005.000	14	15,000,000
		Pelaksanaan Lomba Desa	Tersedianya Pelaksanaan Lomba Desa						15,000,000
		7.01.06.2.01.03 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Desa	13	4.996.000 -	14	15,000,000 -
		7.01.06.2.01.05 Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Desa	13	-	14	15,000,000 -
		7.01.06.2.01.06 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Desa	13	-	14	15,000,000 -
		7.01.06.2.01.07 Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah BPD yang dibina		BPD	13	-	14	-
		7.01.06.2.01.12 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Difasilitasi Tupoksinya		Lembaga	13	369.395.000 -	14	396,955,000 -
		7.01.06.2.01.13 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan partisipatif	Tersedianya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan partisipatif			13	5.950.000		15,000,000
		7.01.06.2.01.14 Fasilitas Kerja Sama Antar desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama (antar Desa dan Pihak Ketiga)		Desa	13	-	14	-
		7.01.06.2.01.16 Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				6.295.000		15,000,000
		7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Tersedianya Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya				6.100.000		15,000,000
		7.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Koordinasi Pelaksanaan pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan		Kegiatan	13	5.715.000 -	14	15,000,000 -

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kab. Grobogan

Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Purwodadi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Purwodadi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan Purwodadi								12,925,151,650				12,925,151,650	
7					UNSUR KEWILAYAHAN								12,925,151,650				12,925,151,650	
7	01				KECAMATAN ADMINISTRASI								10,556,190,250				10,556,190,250	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								10,556,190,250				10,556,190,250	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								30,595,000				30,595,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	30,595,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	30,595,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,337,464,000				5,337,464,000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	45 Orang/bulan	-	5,302,502,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	5,302,502,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	10,414,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10,414,000



7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	-	12 Laporan	-	24,548,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	24,548,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								218,629,000					218,629,000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	129 Paket	-	63,545,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	129 Paket	63,545,000
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	26 Orang	-	90,084,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 Orang	90,084,000
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
						-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	27 Orang	-	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27 Orang	65,000,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								821,523,300					821,523,300
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	30,452,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	30,452,500
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	395,008,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	395,008,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	104,231,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	104,231,800
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	24,000,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material													
						-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	143,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	143,010,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	114,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	114,340,000
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	10,481,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10,481,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2,672,411,200					2,672,411,200

7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	3 Unit	-	2,482,007,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2,482,007,200
					Pembangunan Gedung Pendukung Tahap II								1,443,495,000					1,443,495,000
					Pembangunan Rumah Dinas Camat Purwodadi								419,908,000					419,908,000
					Pembangunan Tempat Parkir								199,695,400					199,695,400
					Penataan Lingkungan Geung Pendukung Kantor kecamatan Purwodadi								418,909,000					418,909,000
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	22 Unit	-	190,404,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22 Unit	190,404,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								819,289,750					819,289,750
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	149,183,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	149,183,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	655,106,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	655,106,750
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								656,278,000					656,278,000

7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	12 Unit	-	41,278,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	41,278,000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	6 Unit	-	575,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	575,000,000
					Rehabilitasi Sedang/berat Kepala Kelurahan Danyang								200,000,000					200,000,000
					Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan Purwodadi								10,000,000					10,000,000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kepala Kelurahan Kuripan								200,000,000					200,000,000
					Rehabilitasi Sedang/berat Kepala Kelurahan Kalongan								55,000,000					55,000,000
					Rehabilitasi Sedang/berat Pendopo Kelurahan Kalongan								55,000,000					55,000,000
					Rehabilitasi Sedang/berat Mushola Kelurahan Kalongan								55,000,000					55,000,000
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	0 Unit	-	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	40,000,000
7	01				KECAMATAN								45,129,000					45,129,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								45,129,000					45,129,000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								45,129,000					45,129,000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													

						-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	4 Laporan	-	45,129,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	45,129,000
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1,331,652,000					1,331,652,000
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1,301,318,600					1,301,318,600
7	01	03	2.02	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	4 Pokmas / Ormas	-	1,301,318,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1,301,318,600
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								996,992,600					996,992,600
							Pavingisasi jalan Danyang Utara RT 08 RW 02						23,017,200					23,017,200
							Pavingisasi jalan Mekarsari RT 06 RW 04 Kelurahan Danyang						68,294,200					68,294,200
							Pavingisasi Jalan RT 04 RW 07 Kelurahan Danyang						23,690,400					23,690,400
							Talud jal;an menuju Makam Kablukan RW 8 kelurahan danyang						85,928,400					85,928,400
							Rehabilitasi Bangunan Atas Gedung kantor Lembaga PKK Keleurahan Kuripan						165,044,000					165,044,000
							RehabilitAasi Gedung PKK Kelurahan Purwodadi						150,129,000					150,129,000
							Penataan Lingkungan Halaman Kantor kelurahan Purwodadi						150,129,000					150,129,000
							Penataan Lingkungan RT 01 RW 03 ( pavingisasi, pembuatan Saluran Air )						105,328,600					105,328,600
							Penataan Lingkungan RT 07 RW 01 ( Pembuatan Saluran Air )						75,302,800					75,302,800
							Pembangunan Tempat Ibadah di Lingkungan TK DW I dan PAUD						150,129,000					150,129,000
					Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan								304,326,000					304,326,000
							Makanan Tambahan Untuk Posyandu kelurahan Purwodadi						51,984,000					51,984,000
							Peningkatyan Gizi Baliata PMT Posyandu kelurahan Kuripan						114,228,000					114,228,000
							Pemberian Makanan Tambahan ( PMT ) untuk 9 Pos Posyandu dan 3 Pos Lansia						33,022,000					33,022,000

						Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Tanaman Toga								45,030,000					45,030,000		
						Pelatihan Pemulasaran Jenazah								60,062,000					60,062,000		
7	01	03	2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								10,326,400						10,326,400	
7	01	03	2.03	02		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan															
							-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	17 Lembaga Kemasyar akatan	-	10,326,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	17 Lembaga Kemasyar akatan	10,326,400		
7	01	03	2.06			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								20,007,000							20,007,000
7	01	03	2.06	06		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															
							-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	17 Keluarga	-	20,007,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	17 Keluarga	20,007,000		
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								13,684,000							13,684,000
7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								13,684,000							13,684,000
7	01	04	2.01	02		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat															
							-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	13,684,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	13,684,000		
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								431,601,000							431,601,000
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								431,601,000							431,601,000
7	01	05	2.01	01		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun															

					1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
						-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	65 Orang	-	418,117,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	65 Orang	418,117,000
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
						-	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	45 Orang	-	13,484,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45 Orang	13,484,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								546,895,400					546,895,400
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								546,895,400					546,895,400
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa													

						-	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	14,940,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	14,940,400
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
						-	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	15,000,000
							Pelaksanaan Lomba Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Lomba Desa		- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Lomba Desa		15,000,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
						-	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	15,000,000
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa													
						-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	15,000,000
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa													



						-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata n Desa	1 Dokumen	15,000,000
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan													
						-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	396,955,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	396,955,000
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif													
						-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	15,000,000
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa													
						-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	15,000,000
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
						-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	15,000,000
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan													

						-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15,000,000
TOTAL													12,925,151,650					12,925,151,650

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Catatan Penting**

Rancangan Awal Rencana Kerja adalah dokumen awal perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Rancangan Awal Renja Kecamatan Purwodadi Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Kecamatan Purwodadi tahun 2021-2026.

Rancangan Awal Renja Kecamatan Purwodadi Tahun 2023 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja program kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Untuk tahun 2024 Renja Kecamatan Purwodadi terdiri dari 6 program, 17 kegiatan, dan 72 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 9.251.655.200 (Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).

Rancangan Awal Renja Kecamatan Purwodadi Tahun 2024 selanjutnya menjadi pedoman awal yang pada tahapan selanjutnya akan disempurnakan lagi menjadi Rancangan Renja dan terakhir menjadi Renja yang bermanfaat bagi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

#### **5.2 Kaidah Pelaksanaan**

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

### 5.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan yang telah ditetapkan pada tahun 2024 maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

Purwodadi, 31 Maret 2023

  
KAMAT PURWODADI  
**TONDI SUMARJAKA, SH**

NIP. 19700722 199403 1 007